

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya memiliki lembaga- lembaga pemerintahan, salah satunya lembaga yudikatif sebagaimana terlihat dari Pasal 24 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Lebih jauh lagi juga di atur lebih khusus dalam Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang dimaksud mencakup 4 (empat) wilayah hukum, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat lembaga peradilan diatas, masing-masing memiliki kekuasaan (kewenangan) yang terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan

kekuasaan mutlak atau absolut (*absolute competentie*). Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan atau kewenangan untuk mengatur pembagian kekuasaan mengadili pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. Sedangkan kewenangan absolut (kekuasaan mutlak) berkaitan dengan wewenang suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain atau menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan kewenangan absolut suatu peradilan, peradilan agama dan peradilan umum memiliki kewenangan yang sama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama salah satunya di bidang Perkawinan. Dalam hal ini yang membedakannya adalah untuk peradilan agama hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang beragama Islam, sedangkan peradilan umum untuk mereka yang non-muslim.<sup>2</sup>

Kewenangan mengadili perkara dalam lingkungan peradilan agama terbatas pada perkara-perkara tertentu. Kewenangan mengadili perkara hanya bersifat khusus, yaitu meliputi hukum tertentu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi

---

<sup>1</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 11.

<sup>2</sup> Meilisa Fitri Harahap (2011), *Perkawinan Antar Agama* dalam SekaliLagi.com, diakses tanggal 9 januari 2016)

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>3</sup>

Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi dalam kenyataannya bahwa Kantor Urusan Agama telah menikahkan pasangan sebelumnya menikah secara khatolik.

Perkawinan yang telah dijalani dengan penuh keharmonisan pada awalnya apabila tidak dijaga dengan baik, akan menimbulkan ketidakcocokan di antara keduanya sehingga kebanyakan salah satu pasangan menginginkan adanya Perceraian. Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri.

Perceraian yang dilakukan antar suami-istri yang memiliki agama dan keyakinan yang sama tidak ada masalah dalam pengajuan permohonan atau gugatannya kepada pengadilan, karena jelas jika perceraian itu dilakukan oleh mereka yang memiliki agama Islam maka pengadilan agama yang akan memutusnya, namun jika perceraian dilakukan oleh mereka yang menganut agama di luar Islam maka

---

<sup>3</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2011, hlm 155-156

pengadilan Negeri yang akan memutusnya karena sesuai dengan kewenangan absolut suatu pengadilan.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>4</sup>, yaitu :

1. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Berkaitan dengan itu, Pengadilan Agama Depok telah menyelesaikan perkara yang diputus melalui Nomor : 1370/Pdt.G/2013/PA.Dpk. sebelumnya suami-istri itu keduanya telah melakukan perkawinan secara khatolik di Gereja GPIB Effatha pada tanggal 12 Desember 1993, dengan kutipan akta perkawinan Nomor 330/J5/1993 tanggal 12 November 1993 dari satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta selatan, kemudian pada tanggal 25 Maret 1995 keduanya menikah lagi secara Islam dengan akta nikah Nomor 854/48/III/1995 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Bandung.

Bahwa sekalipun antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 30 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah

---

mendapatkan kutipan akta perceraian Nomor 68/PC/2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Depok dalam putusan Nomor : 1370/Pdt.G/2013/PA.Dpk. Pengadilan Agama Depok tidak menerima gugatan cerai Penggugat dengan dalil tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya. Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor: 1370/Pdt.G/2013/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Februari 2014 sebagai pihak Terbanding. Bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan perundnag-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok hanya memeriksa dan mengadili tentang kedudukan Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak berhak lagi sebagai pihak-pihak perkara ini ( tidak mempunyai *legal standing*) dan sama sekali belum masuk pada substansi dari perkara itu sendiri, maka sebelum memeriksa bagian eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan terlebih dahulu memeriksa dan menentukan tentang masih dapat atau tidaknya Pembanding dan Terbanding beracara (sebagai pihak-pihak) dalam perkara ini.

Bahwa perkawinan yang dilakukan secara dua kali dengan tata cara agama yang berbeda sama halnya dengan memainkan nilai-nilai yang paling mendasar,

yaitu agama yang dianut, karena tidak saja dapat terjadinya kekacauan hukum (*legal disorder*) dalam hal pencatatan perkawinan, tetapi juga dapat berakibat disfungsionalnya system perkawinan, tetapi juga dapat berakibat disfungsionalnya system perkawinan yang agamis. Padahal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat *fungsionalisme imperative*, yaitu hanya memperkenankan perkawinan *intern religious* (se agama) tidak perkawinan *inter religious* (antar agama). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Depok Nomor: 1370/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

Dari Permasalahan di atas terdapat perbedaan antara putusan hakim pada tingkat pertama dan pendapat hakim pada tingkat banding, hal ini dapat membuat masyarakat kebingungan. Mana sebenarnya hukum yang dapat dijadikan acuan untuk masalah seperti itu, sehingga permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Pengadilan manakah yang berwenang mengadili perceraian R dengan J ?
2. Apa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan perkara Perceraian antara R dengan J ?
3. Temuan hukum apa yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui yang berwenang mengadili perkara perceraian tersebut.
2. Untuk memahami pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan perkara perceraian tersebut.
3. Untuk mengetahui temuan hukum hakim pada putusan tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Peradilan Islam, khususnya dalam penggalian hukum di tiap tingkatan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, terhadap suatu perkara.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa. Sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah, khususnya di bidang Peradilan Islam.

## E. Kerangka Berpikir

Putusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Di satu pihak putusan itu merupakan wujud penerapan atau penampakan hukum (*izhar al-ahkam*) dalam peristiwa hukum yang konkret, yaitu perkara (*legal case*). Di pihak lain putusan itu mencerminkan pembentukan dan penemuan hukum (*rechtsfinding*) oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad.

Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (substantive) maupun hukum formal (procedural). Hukum tertulis bersumber pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Putusan pengadilan juga berdasarkan pada hukum tidak tertulis, terutama doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha.

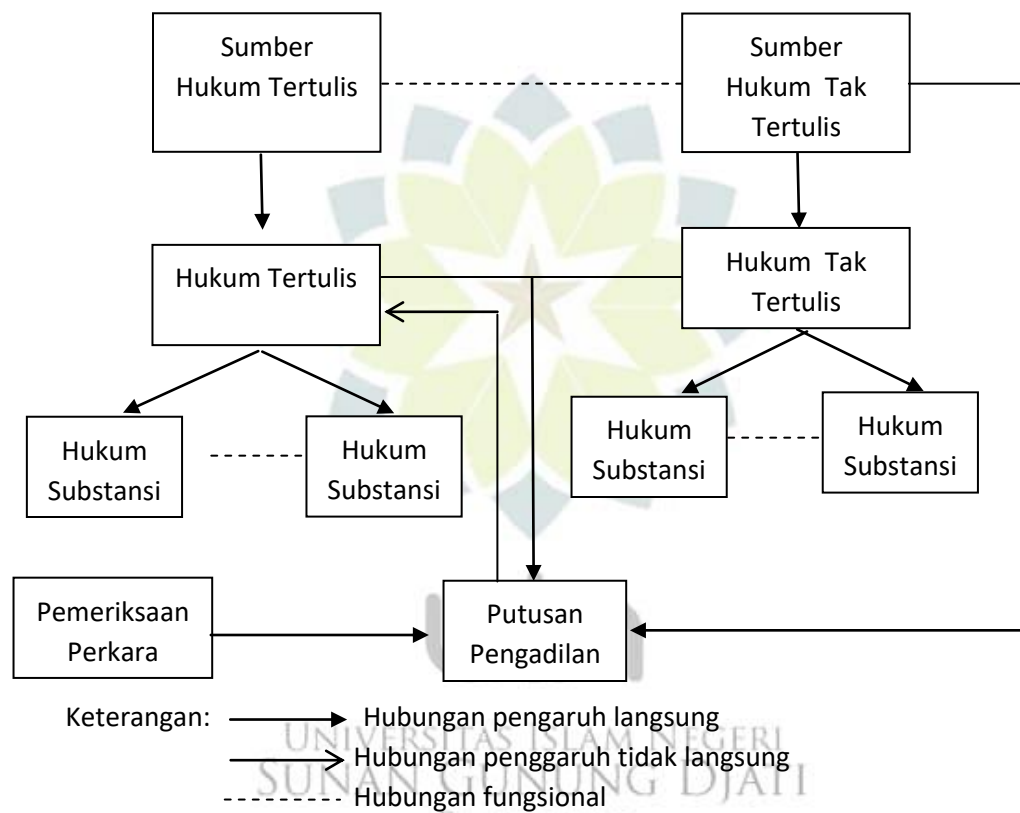
Dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan pengadilan itu dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan (hukum acara) yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*rechtskracht*) menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama.



Berdasarkan uraian diatas maka gambaran kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.1



**Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir**

Sesuai gambaran kerangka berpikir diatas dapat diketahui bahwa putusan pengadilan itu didasarkan pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis sebagaimana tercermin dalam isi putusan tersebut.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam penelitian dan pembahasan untuk menyusun dan mengumpulkan data, peneliti telah menentukan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan jenis penelitian analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, bahan berupa ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan terdiri atas KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- b. Sumber data sekunder (data yang digunakan sebagai pelengkap dari pendukung data primer). Data ini diambil dari membaca buku-buku dan jurnal termasuk dokumen penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan atau tulisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan semi struktural yakni disamping menyusun pertanyaan, juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Melakukan penelitian untuk memperoleh data awal terhadap pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Depok dengan Nomor Putusan 1370/Pdt.G/2013/PA.Dpk yang kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Putusan Nomor Putusan 217/Pdt.G/2014/PTA.Bdg dengan cara wawancara.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji. Menyalin isi catatan dan hasil wawancara menjadi bahasa tulisan, sesuai apa yang diungkapkan oleh Majelis Hakim dan para pihak didalam persidangan.

#### 4. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli, dan logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sangat logis yang merupakan jawaban dari permasalahan. Kemudian penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) merupakan teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

#### 5. Lokasi Penelitian

##### a. Instansi

Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No.714, Babakan Penghulu, Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat.

##### b. Perpustakaan

Untuk memperoleh data yang lengkap maka peneliti mencari berbagai sumber di perpustakaan-perpustakaan yang memiliki sumber buku mengenai Hukum Acara Peradilan Agama, yaitu Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Perpustakaan Daerah Bandung, dan Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Bandung